



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PP 39  
TRIWULAN III  
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT JENDERAL**

**Kementerian  
Perindustrian**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta,        Oktober 2020

**INSPEKTUR JENDERAL**

**ARUS GUNAWAN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	9
II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	9
II.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan .....	12
II.3 Rencana Aksi.....	14
II.4 Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	25
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	32
III.1. Hasil yang Telah Dicapai .....	32
III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal .....	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 .....	12
Tabel 3 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Triwulan III .....	14
Tabel 4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	25
Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III .....	33
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Inspektorat I .....	34
Tabel 7 Anggaran Kegiatan Inspektorat II .....	37
Tabel 8 Anggaran Keuangan Kegiatan Inspektorat III Triwulan III .....	39
Tabel 9 Anggaran Kegiatan Inspektorat IV Triwulan III .....	42
Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	3
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I .....	6
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II .....	7
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III .....	8
Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV .....	9

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

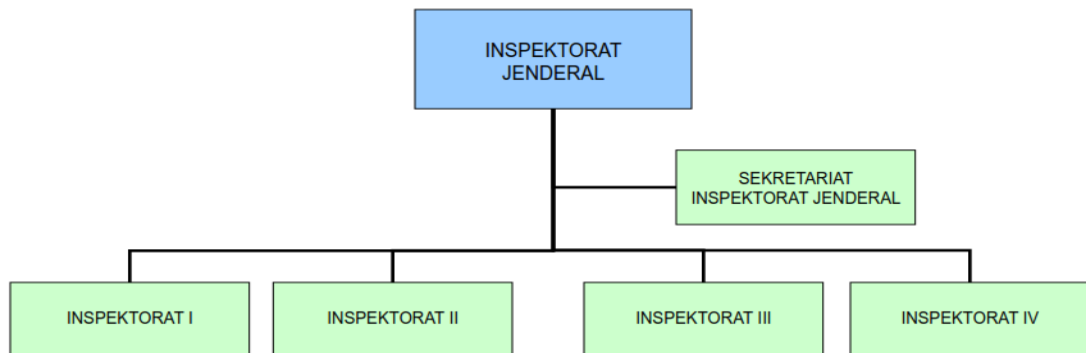
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

### I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal**

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

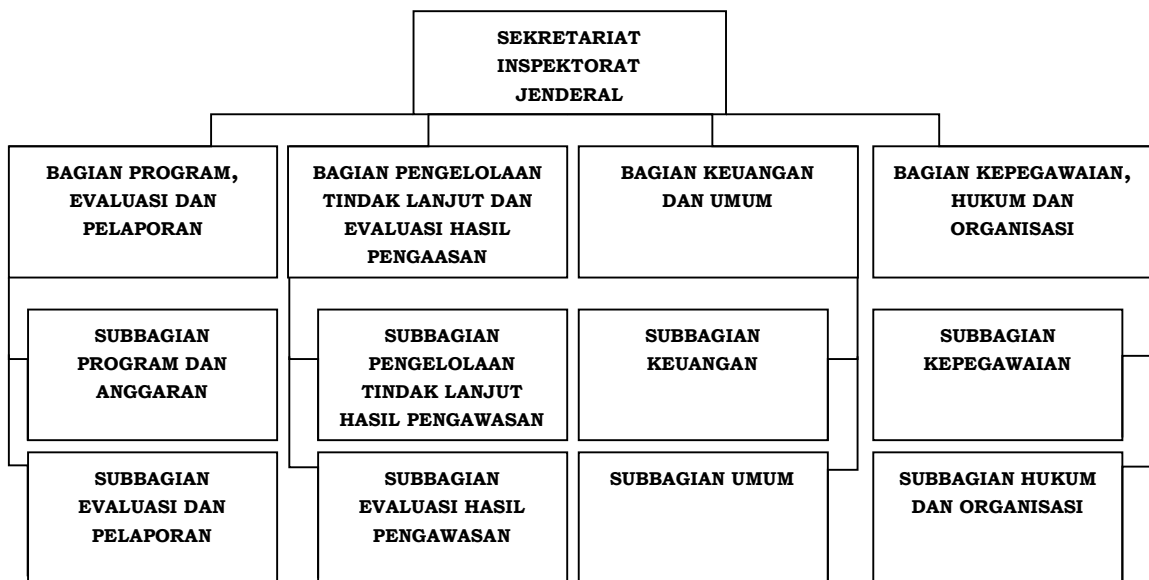
#### 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.



Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Sub Bagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

- c. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.
- 2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

- d. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri dari :

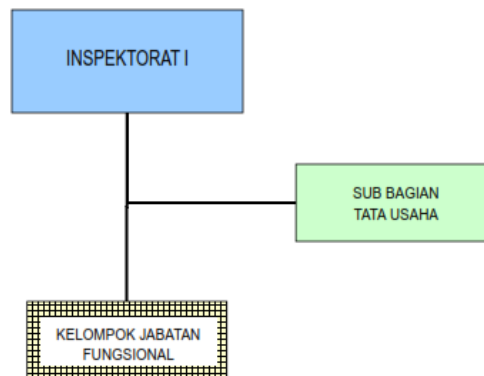
- 1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## 2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
  - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
  - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



**Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I**

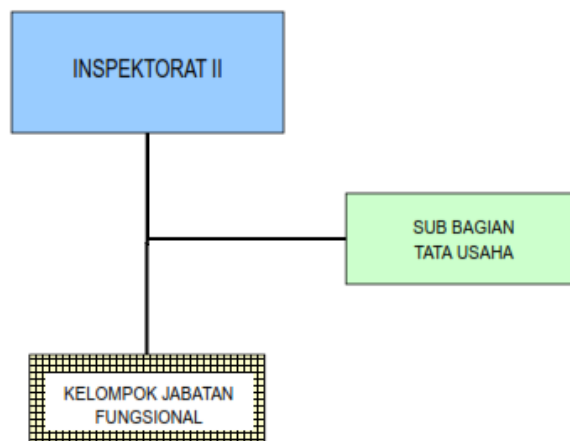
## 3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
  - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
  - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II**

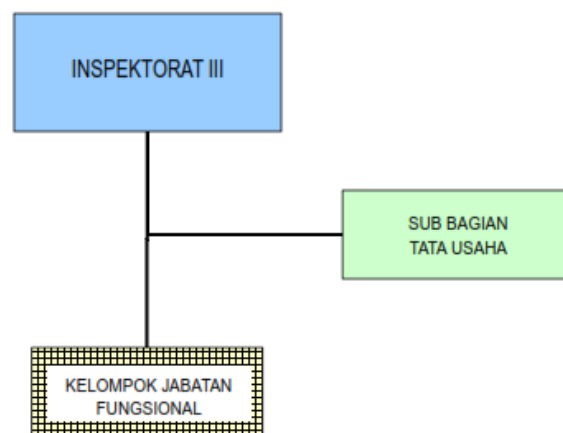
#### 4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;  
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.  
Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



**Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III**

#### 5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional,

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

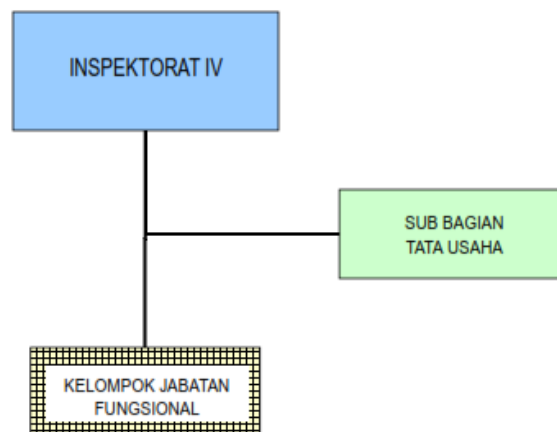
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



**Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV**

## **BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN**

### **II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 60 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 55 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>- Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Bulan Layanan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</li> <li>- Layanan Sarana dan Prasarana Internal</li> <li>- Layanan Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Layanan</li> <li>- 1 Layanan</li> <li>- 12 Layanan</li> </ul>

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2020 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 30.111.422.000.



## II.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, Kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

### II.3 Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Triwulan III**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III		
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>					
1	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5%	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu</li> <li>• Pelaksanaan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)</li> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN</li> <li>• Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>• Koordinasi Audit Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Koordinasi Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persiapan pelaksanaan Monev</li> </ul>
					<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reviu LKBMN semester II Tahun Anggaran 2019 dan Reviu LKBMN semester I Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan yaitu 2 unit Pusat dan 29 satker vertikal BPSDMI; 13 Pendidikan Vokasi, 9 SMK dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I.</li> <li>✓ Pengawasan/Pendampingan manajemen risiko pada: 1 unit Pusat (BPSDMI) dan 6 satker vertikal yaitu Poltek AKA Bogor, Poltek STTT Bandung, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, APP Jakarta dan STMI Jakarta</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kerja/Tenaga Pendidik)</li> <li>• Pelaksanaan pembinaan Pengawasan Kinerja oleh pimpinan</li> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Ditjen ILMATE</li> <li>• Audit Pengembangan dan Penumbuhan IKMA dan BPIPI Sidoarjo</li> <li>• Audit BMDTP Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA</li> </ul> <p>Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) Ditjen IKMA</li> </ul>	<p>WUB Ditjen IKMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reviu RKAKL</li> <li>✓ Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE &amp; IKMA</li> <li>✓ Pelaksanaan Pemetaan BMN dan penyelesaian hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> <li>✓ Reviu LK dan BMN Satker Inspektorat II</li> <li>✓ Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE &amp; IKMA</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			Pengawasan • Triwulanan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA • Reviu PIPK • Reviu Perencanaan Anggaran (RKAKL) • Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II • Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA • Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA • Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja Inspektorat II  <b>IR III:</b> • Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu PIPK Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III • Pelaksanaan Reviu RK-BMN • Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	<b>IR III:</b> ✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2020 telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode yang dilakukan dengan mendatangi satker cakupan tugas Ir III, metode online, dan metode pelaksanaan di kantor. ✓ Pelaksanaan Reviu RKAKL telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2020. ✓ Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kegiatan berisiko tinggi pada 5 satker cakupan tugas wilayah Jawa Barat, telah dilakukan di bulan Juli 2020, yaitu pada satker di Bandung; BBBT, BBLM, BBT, BBK, dan BBPK.  <b>IR IV:</b> ✓ Pelaksanaan audit Ditjen KPAll dan Industri Agro telah dilaksanakan ✓ Reviu Perencanaan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p>Aparatur Kementerian Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Program SIINAS (Satker Pusdatin)</li> <li>• Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL</li> <li>• Pelaksanaan Pengawasan Kinerja</li> <li>• Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Consulting Manajemen Risiko Cakupan Tugas Inspektorat III</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwilayahan Industri &amp; Akses Industri Internasional (KPAII)</li> <li>• Pengawasan Program P3DN</li> <li>• Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro</li> <li>• Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil</li> </ul>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu Perencanaan Anggaran</li> <li>• Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>• Reviu Rencana Kebutuhan BMN Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>• Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> </ul>	
	2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit</li> </ul> <b>IR II &amp; IV: -</b> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas</li> <li>• Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas</li> </ul>	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan IV
	3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas</li> </ul>	<b>IR I:</b> ✓ Sampai dengan Triwulan III, belum ada pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu</li> <li>• Audit dengan tujuan tertentu</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> </ul> <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan aspek kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan</li> </ul>	<p>Inspektorat I.</p> <p><b>IR II, IR IV, &amp; Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW III</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan audit pada satuan kerja cakupan tugas di Lingkungan BPPi dilaksanakan pada Bulan September 2020 dengan mendatangi 6 (enam) satkernya, yaitu BBBBT Bandung, BBT Bandung, BBTPPI Semarang, BBIA Bogor, BBPK Bandung, dan Baristand Industri Bandar Lampung, sedangkan satuan kerja lainnya di Lingkungan BPPi tidak di audit karena adanya pemotongan anggaran untuk percepatan penanggulangan covid-19.</li> </ul>



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Monev Diklat Sistem 3 in 1</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi Monitoring &amp; Evaluasi SAKIP</li> <li>○ Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (Prioritas dalam bidang tekstil)</li> <li>○ Rapat Koordinasi Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> <li>○ Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> <li>○ Pelaksanaan Survey Lapangan Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam</li> </ul>	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monev penilaian implementasi SAKIP terhadap seluruh unit Sekjen dan BPSDMI terdiri dari 6 unit Eselon II pada Sekjen. Dan 3 unit Eselon II pada BPSDMI. Serta 29 satker vertikal cakupan Tugas Inspektorat I.</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III telah tercapai 91% yang diukur dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi SAKIP, rekomendasi atas hasil reuiu, dan rekomendasi atas hasil</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p>mendukung Industri 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengolahan Data Hasil Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Lanjut hasil Pengawasan BPK</li> <li>• Monev SAKIP satuan kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> </ul> <p><b>Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>• Temu Teknis Penyuluhan/ Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>• Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> <li>• Rapat Koordinasi Pengawasan</li> <li>• Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p>audit.</p> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evaluasi SAKIP cakupan Tugas Ir IV telah selesai dilaksanakan terhadap seluruh dokumen kinerja Eselon II.</li> </ul> <p><b>Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 19% dari target yang tertuang di Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 91%.</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Koordinasi PMPRB</li> <li>• Pelaksanaan Pemenuhan Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p>✓ Nilai rata-rata PMPRB unit kerja eselon I Kemenperin: Nilai akhir pemenuhan 13,78; Nilai akhir Reform: 19,97; Nilai akhir total pengungkit: 33,74</p> <p>✓ Penilaian mandiri zona integritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6(enam) area perubahan</li> <li>• Belum terlihat terjadinya pola pikir dan budaya kerja</li> <li>• Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah dll</li> </ul>
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	-	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>Koordinasi dan Penyusunan LAKIP</li> <li>Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Progrsm Kerja dan Anggaran</li> <li>Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III</li> </ul> <b>IR IV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen Evaluasi &amp; Akuntabilitas</li> <li>Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <b>Ses:</b>	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran pengawasan lainnya berupa pemantauan saran dan prasarana pada 3 satker yaitu Politeknik AKA Bogor, Politeknik STTT Bandung, dan SMK-SMAK Bogor.</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Progrsm Kerja dan Anggaran</li> <li>✓ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan pelaksanaan telah mencapai 50% yang diukur dari beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan pada triwulan III telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti reviu</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN III	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> </ul>	revisi anggaran satuan kerja, audit, dan pengawalan terhadap satuan kerja cakupan tugas). Ses: ✓ Monev dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), belum semua IR melakukan pengisian survey
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja</li> <li>• Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN</li> <li>• Reviu Perkin dan Renstra</li> <li>• Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan</li> </ul>	✓ Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen  ✓ Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja  ✓ Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen

## II.4 Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5%	<b>INSPEKTORAT I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan</li> <li>▪ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja</li> <li>▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan,</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<p>Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan</li> <li>▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I</li> </ul> <p><b>INSPEKTORAT II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>- Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK)</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan penyelesaian hibah BMN</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II</li> <li>- Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan</li> <li><b>INSPEKTORAT III</b></li> <li>- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>- Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>- Pengawasan penyelesaian hibah BMN</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III</li> <li>- Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan</li> <li>- Reviu RKBMN</li> </ul>



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<b>INSPEKTORAT IV</b> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	<b>INSPEKTORAT I, II, III, IV</b> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	<b>IR I, II, III, IV</b> Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91%	<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran data tindak lanjut</li> <li>- Analisa dan laporan hasil pengawasan</li> <li>- Fasilitasi kegiatan reuiu RKAKL</li> <li>- Fasilitasi evaluasi SAKIP</li> <li>- Fasilitasi klinik konsultasi Itjen</li> <li>- Fasilitasi pembinaan bidang pengawasan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal ke Satker</li> </ul> <b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	<p><b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Maturitas SPIP Kemenperin</li> <li>- Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ul> <p><b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV</p>
<b>Internal Process Perspective</b>				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar	75%	<p><b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penelaahan sejawat</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
		pelaksanaan pengawasan		<b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	- Melakukan <i>Self-Assessment</i> melalui Aplikasi yang dibentuk oleh BPKP untuk penilaian IACM Level 3.

## **BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **III.1. Hasil yang Telah Dicapai**

Hingga Triwulan III Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak tiga kali. Pagu awal sebesar Rp 49.724.030.000. Revisi pertama dilakukan tanggal 8 April 2020 dengan merevisi komponen dan tidak ada pergeseran anggaran antar output. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Dan revisi ketiga dilakukan pada tanggal 21 September 2020. Revisi ketiga ini merupakan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, dan/atau ralat karena kesalahan administrasi dengan pagu tetap, yaitu sebesar Rp 30.111.422.000.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan III ini telah terlaksana dengan baik, namun sebagian besar kegiatannya harus dihapuskan karena adanya penghematan anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19. Kegiatan Monitoring & Evaluasi yang terdampak, antara lain:

- Inspektorat I : Monev pelaksanaan diklat sistem 3 in 1
- Inspektorat III: Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (prioritas dalam bidang tekstil)
- Inspektorat IV: Monev Kebijakan Industri Garam, Monev kebijakan gula rafinasi Industri Agro

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari - September) mencapai Rp. 18.952.134.389,- atau 62,94 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.30.111.422.000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW III tahun 2020 :

**Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan III			Realisasi s.d. Triwulan III			Sisa Anggaran s.d. Triwulan III	
		Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%	Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	1,715,273,000	28.47 %	208,513,984	12.15	68.14 %	1,159,715,152	67.61	555,557,848	32.38
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	1,210,901,000	33.68 %	224,207,000	18.51	67.25 %	622,520,902	51.41	588,380,098	48.59
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	1,326,813,000	29.70 %	208,647,600	15.72	72.30 %	759,384,493	57.23	567,428,507	42.76
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	1,055,308,000	24.13 %	131,771,652	12.48	69.77 %	303,869,504	28.79	751,438,496	71.20
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	24,803,127,000	18.21 %	5,684,471,730	22.91	56.69 %	16,106,644,338	64.94	8,696,482,662	35.06
<b>TOTAL</b>	<b>30,111,422,000</b>	<b>13.07 %</b>	<b>6,457,611,966</b>	<b>21.45</b>	<b>58.15 %</b>	<b>18,952,134,389</b>	<b>62.94</b>	<b>11,159,287,611</b>	<b>37.06</b>

Capaian tersebut dihitung dari capaian pelaksanaan kegiatan masing-masing Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan uraian sebagai berikut :

**a. Inspektorat I**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Triwulan III Tahun 2020 (Juli-September) mencapai Rp. 208,513,984,- atau sebesar 12.15% dari pagu sebesar Rp. 1,715,273,000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 sebesar 67.61%.
- Terdapat revisi komposisi anggaran sebesar Rp 119,702,000,- pada Inspektorat I, pada kegiatan *Consulting* semula pagunya adalah Rp 65,838,000,- pada Triwulan II, berubah menjadi Rp 185,540,000,- pada Triwulan III ini, dan kegiatan Layanan Audit Internal berubah dari semula pada Triwulan II Rp 856,965,000,- menjadi Rp 737,263,000 pada Triwulan III. Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Inspektorat I tersaji dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6 Anggaran Kegiatan Inspektorat I**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan III	
		Fisik	Keuangan (Rp.)	%	Fisik	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202,300,000	73.12	56,374,000	27.86	35.77	134,610,900	38.67	124,063,100	61.33
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587,170,000	0	0	0	98.78	581,634,730	99.06	5,535,270	0.94
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3,000,000	60	1,000,000	33.33	60	1,000,000	33.33	2,000,000	66.67
<i>Consulting</i> Kegiatan Berisiko Tinggi Inspektorat I	185,540,000	45.23	58,521,000	31.54	50.54	95,543,400	51.49	89,996,600	48.51
Layanan Audit Internal	737,263,000	53.93	92,618,984	12.56	57.71	346,926,122	47.06	390,336,878	52.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,715,273,000</b>	<b>28.47</b>	<b>208,513,984</b>	<b>12.15</b>	<b>68.14</b>	<b>1,159,715,152</b>	<b>67.61</b>	<b>555,557,848</b>	<b>32.38</b>

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat I yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:

- (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Pencapaian kinerjanya yaitu:
- ✓ Realisasi anggaran Kemenperin: Rp.3.368.036.653.338,00  
temuan BPK: Rp.4.967.582.710,63, maka batas toleransi temuan material: 0,15%, telah mencapai target
- (1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat I sebagai berikut:
- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Pencapaian belum dapat diukur karena belum ada total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun.
- (1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
- ✓ Pelayanan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal, namun pengaduan masyarakat berkadar pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat I hingga saat ini belum ada yang perlu ditindaklanjuti.
- (1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja
- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan Monev Diklat Sistem 3 in 1
  - ✓ Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP Eselon II telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020 hingga 30 Juni 2020.
- 2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:
- (2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
- ✓ Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I
  - ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan Implementasi Manajemen Risiko
- 3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:
- (3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III merupakan kumulatif dari kegiatan Triwulan I & II. Pelaksanaan Audit dilakukan pada



1 unit Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal dan 11 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek ATI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, SMK-SMTI Bandar Lampung, SMK-SMTI Yogyakarta dan BDI Yogyakarta. Secara keseluruhan pelaksanaan audit telah mencapai 65%. Pada kegiatan ini tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan telah memenuhi standar pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

(3.2) Capaian IACM

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal

**b. Inspektorat II**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Triwulan III Tahun 2020 (Juli-September) sebesar Rp. 224,207,000,- atau sebesar 18.51% dari Pagu sebesar Rp. 1,210,901,000,- dengan realisasi fisik sebesar 33.68%
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari-September) sebesar 67.25% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 622,520,902,- atau sebesar 51.41%, lebih lengkapnya dapat dipantau pada tabel 7 dibawah.
- Terdapat perubahan komposisi anggaran pada Kegiatan Inspektorat II di Triwulan III ini. Pada kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II semula pada Triwulan II memiliki pagu sebesar Rp 238,999,000,- berubah menjadi Rp 186,737,000, kemudian pada kegiatan reviu laporan keuangan dan BMN Inspektorat II terdapat perubahan anggaran sebesar Rp 54,464,000 yaitu pagu kegiatan reviu semula Rp 133,232,000 menjadi Rp 78,768,000,-. Selain itu, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan mengalami perubahan pagu anggaran yang semula Rp 306,769,000 menjadi Rp 268,809,000. Perubahan pagu juga terjadi di kegiatan *Consulting* dan layanan Audit Internal, pada dua kegiatan ini terjadi penambahan pagu pada triwulan III.

**Tabel 7 Anggaran Kegiatan Inspektorat II**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan II	
		Fisik	Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik	Keuangan (Rp.)	(%)	J u m l a h (Rp.)	(%)
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	186,737,000	46,02	19,472,000	10.42	86.27	109,515,668	58.65	77,221,332	41.35
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	78,768,000	24.52	0	0	100	67,725,100	85.98	11,042,900	14.02
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	268,809,000	81.24	104,378,600	38.83	82.65	105,365,600	39.20	163,443,400	60.80
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	293,129,000	23.15	94,937,400	32.38	57.86	168,161,634	57.37	124,967,366	42.63
Layanan Audit Internal	383,458,000	4.28	5,419,000	1.41	47.63	171,752,900	44.79	211,705,100	55.21
<b>TOTAL</b>	1,210,901,000	33.68	224,207,000	18.51	67.25	622,520,902	51.41	588,380,098	48.59

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat II yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Inspektorat II yaitu:
      - ✓ Telah diketahui realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2019 yaitu Rp 3,368,036,653,338
      - ✓ Telah didapatkannya nilai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp 4,967,582,710.63
      - ✓ Dengan membandingkan kedua angka tersebut diperoleh hasil batas toleransi temuan material pengawasan yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal yaitu 0.15%
    - (1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat II sebagai berikut:
      - ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada Ditjen IKMA yang berjumlah 10 temuan & 12 rekomendasi.

- ✓ Hasil audit pada Ditjen ILMATE berjumlah 12 temuan dan 22 rekomendasi
- ✓ Namun capaian saat ini belum dapat diukur karena belum dapat diketahui berapa jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

(1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

- ✓ Pelaksanaan Audit Khusus
- ✓ Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
- ✓ Inspektorat II telah selesai menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk.

(1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja

- ✓ Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Ditjen ILMATE (12 temuan dan 22 rekomendasi) & IKMA (10 temuan & 12 rekomendasi)
- ✓ Sampai saat ini belum ada rekomendasi yang ditindaklanjuti

2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:

(2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kuesioner online dalam dan proses verifikasi.

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Belum dilakukan dan belum dapat diukur

(3.2) Capaian IACM

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal

**c. Inspektorat III**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III berdasarkan SPAN, pada Triwulan III Tahun 2020 (Juli-September) mencapai

Rp 208,647,600,- atau sebesar 15.72 % dari pagu sebesar Rp. 1,326,813,000,- dengan realisasi fisik sebesar 29.70%.

- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari-September) sebesar 72.30% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 759,384,493,- atau sebesar 57.23%.
- Terdapat perubahan komposisi anggaran pada seluruh kegiatan Inspektorat III, pada kegiatan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III mengalami penambahan pagu pada Triwulan III sebesar Rp 7,990,000,- kemudian pada kegiatan reuvi LKBMN Inspektorat III terjadi penurunan pagu sejumlah Rp 91,003,000,- dan penurunan pagu juga dilakukan pada kegiatan Monitoring dan evaluasi kebijakan sebesar Rp 7,980,000,- Secara lengkap Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Inspektorat III tersaji dalam tabel 8 dibawah ini.

**Tabel 8 Anggaran Keuangan Kegiatan Inspektorat III Triwulan III**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan II	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	204,919,000	54.96	6,733,000	3.28	55.48	143,973,320	70.26	60,945,680	29.74
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	505,244,000	54.48	43,796,600	8.66	100	457,143,173	90.48	48,100,827	9.52
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	4,752,000	-	2,332,000	49.07	100	2,482,000	52.23	2,270,000	47.77
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III	275,595,000	-	155,786,000	56.53	-	155,786,000	56.53	119,809,000	43.47
Layanan Audit Internal	336,303,000	7.88	0	0	99.78	0	0	336,303,000	100
<b>TOTAL</b>	<b>1,326,813,000</b>	<b>29.70</b>	<b>208,647,600</b>	<b>15.72</b>	<b>72.30</b>	<b>759,384,493</b>	<b>57.23</b>	<b>567,428,507</b>	<b>42.77</b>

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja, kegiatan Inspektorat III yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:

(1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Inspektorat III yaitu:

- ✓ Koordinasi Reviu Laporan Keuangan & BMN, telah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020. Dengan tiga metode yaitu :
  - Metode Mendatangi satuan kerja; BBIA Bogor, BBBBT Bandung, BBLM Bandung, BBK Bandung, BSI Jakarta, dan BBKK Jakarta.
  - Metode Online; BPPI
  - Metode pelaksanaan di Kantor; Inspektorat Jenderal dan Pusdatin.
- ✓ Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
- ✓ Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL
- ✓ Reviu RKA-KL (revisi anggaran/alokasi anggaran) TA 2020 dilaksanakan pada bulan Juli hingga September terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III.
- ✓ Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja & Consulting Manajemen Risiko Cakupan Tugas Inspektorat III pada 5 satker wilayah Bandung pada bulan Juli 2020, yaitu BBBBT, BBLM, BBT, BBK, dan BBPK.

(1.2)Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat II sebagai berikut:

- ✓ Koordinasi Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas
- ✓ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas

(1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

- ✓ Penyusunan Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu
- ✓ Audit dengan tujuan tertentu, pada satuan kerja di lingkungan BPPI dilaksanakan pada Bulan September 2020 dengan mendatangi 6 satkernya yaitu BBBBT Bandung, BBT Bandung, BBT PPI Semarang, BBIA Bogor, BBPK Bandung, dan Baristand Industri Bandar Lampung.

(1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja

- ✓ Koordinasi Monev SAKIP
- ✓ Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 (Prioritas Dalam Bidang Tekstil)
- ✓ Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung Industri 4.0
- ✓ Pelaksanaan survey lapangan monev kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (tidak terlaksana akibat Covid-19)
- ✓ Pengolahan data hasil Monev Kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung industri 4.0

2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:

(2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Consulting Manajemen Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III

(3.2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal

**d. Inspektorat IV**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Triwulan III Tahun 2020 (Juli-September) mencapai Rp 124,250,534,- atau sebesar 11,77% dari pagu sebesar Rp 1,055,308,000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari-September) sebesar 69.77% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 303,869,504,- atau sebesar 28.79%.
- Terjadi perubahan komposisi anggaran empat kegiatan Inspektorat IV pada Triwulan III ini, sebelumnya di Triwulan II, Kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 115,815,000 lalu pada Triwulan III ini berubah naik menjadi Rp 141,009,000. Dan Kegiatan Consulting pada Inspektorat IV juga naik dari Rp 112,900,000 menjadi Rp 205,270,000 pada Triwulan III ini. Sebaliknya, Kegiatan Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV mengalami penurunan dari semula pada Triwulan II Rp 11,782,000 menjadi Rp 9,712,000 pada Triwulan III ini. Kemudian Kegiatan Layanan Audit Internal pun mengalami penurunan pagu dari Rp 680,210,000 menjadi Rp 564,716,000.
- Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Inspektorat IV tersaji dalam tabel 9 berikut:

**Tabel 9 Anggaran Kegiatan Inspektorat IV Triwulan III**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan III	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	141,009,000	3.98	4,845,000	3.43	50.16	62,621,895	44.41	78,387,105	55.59
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	134,601,000	24.33	19,194,400	14.26	72.99	19,194,400	14.26	115,406,600	85.74
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	9,712,000	-	3,500,000	36.04	100	5,942,000	61.18	3,770,000	38.82
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	205,270,000	20.95	37,196,449	18.12	66.90	67,894,967	33.08	137,375,033	66.92
Layanan Audit Internal	564,716,000	30.68	67,035,803	11.87	74.42	148,216,242	26.25	416,499,758	73.75
<b>TOTAL</b>	<b>1,055,308,000</b>	<b>24.13</b>	<b>131,771,652</b>	<b>12.48</b>	<b>69.77</b>	<b>303,869,504</b>	<b>28.79</b>	<b>751,438,496</b>	<b>71.20</b>

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja, kegiatan Inspektorat IV yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Capaian hingga Triwulan III ini belum dapat diukur. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat IV yaitu:
      - ✓ Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwilayahan Industri & Akses Industri Internasional → proses audit sedang diselesaikan dan hingga akhir triwulan III ini laporan hasil pengawasan masih belum selesai diterbitkan.
      - ✓ Pengawasan Program P3DN → proses audit sedang diselesaikan dan hingga triwulan III ini laporan hasil pengawasan masih belum selesai diterbitkan.
      - ✓ Pengawasan Program Penumbuhan & Pengembangan Industri Berbasis Agro → telah selesai dilaksanakan.
      - ✓ Pengawasan Program Penumbuhan & Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil → proses audit sedang diselesaikan dan hingga akhir triwulan III ini laporan hasil pengawasan masih belum selesai diterbitkan.
      - ✓ Reviu Perencanaan Anggaran
      - ✓ Reviu Laporan Keuangan & BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV → telah dilaksanakan pada 4 satuan kerja dalam cakupan tugas Inspektorat IV.
    - (1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Indikator kinerja ini belum dapat diukur. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat II sebagai berikut:
      - ✓ Koordinasi Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
      - ✓ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV
    - (1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti. Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan III ini
      - ✓ Pengawasan dengan tujuan tertentu



- (1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Pada Triwulan III ini belum dapat diukur. Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat IV adalah:
- ✓ Tindak Lanjut hasil Pengawasan BPK
  - ✓ Monitoring & Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV
- 2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:
- (2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
- ✓ Konsultasi penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja
- 3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:
- (3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Pada indikator ini belum dilakukan pengukuran karena belum adanya kuesioner sebagai alat bantu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja yang menjadi cakupan tugas Inspektorat IV. Kegiatan yang telah dilakukan:
- ✓ Penyusunan Dokumen Evaluasi & Akuntabilitas
  - ✓ Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
- (3.2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

**e. Sekretariat Inspektorat Jenderal**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2020 (Juli-September) mencapai Rp 5,684,471,730,- atau sebesar 22.92% dari pagu sebesar Rp 24,803,127,000,- dengan realisasi fisik sebesar 18.21 %.
- Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari-September) sebesar 56,59 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16,016,644,338,- atau sebesar 64.94%. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

**Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan III			s/d Triwulan II			Sisa Anggaran s/d Triwulan II	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2,932,744,000	7.00	476,296,203	16.24	35.19	1.776.636.231	60,58	1.156.107.769	39,42
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	105,000,000	-	102,051,400	97.19	0	102.051.400	97,19	2.948.600	2,80
Layanan Perkantoran	21,765,383,000	19.79	5,106,124,127	23.46	59.36	14.227.956.707	65,37	7.537.426.293	34,63
<b>TOTAL</b>	24,803,127,000	18.21	5,684,471,730	22.92	56.59	16.106.644.338	64,94	8.696.482.662	35,06

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal, kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti, Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu:
      - ✓ Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW II
    - (1.2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja
      - ✓ Dari Total 204 jumlah temuan dari seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian, terdapat 39 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, ini berarti bahwa posisi capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal baru mencapai 19% dari target perjanjian kinerja sebesar 91%.
  - 2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:
    - (2.1) Peningkatan Nilai RB area Penguatan Pengawasan
      - ✓ Telah disusun Laporan APiP dan saat ini telah diserahkan kepada KemenPAN dan RB
      - ✓ Nilai RB area penguatan Pengawasan telah diperoleh pada Triwulan III, yaitu 83%
    - (2.2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
      - ✓ Akan dilaksanakan secara online dalam bentuk kuesioner dan proses verifikasi pada Triwulan IV
  - 3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:
    - (3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Belum dilaksanakan Monev Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal, yaitu pemberian kuesioner online kepada para kepala satker, akan dilaksanakan pada TW IV

(3.2) Capaian IACM Itjen

- ✓ Akan dilakukan *self-assessment* melalui aplikasi online BPKP

### III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Namun, hingga bulan September ini telah dilakukan tiga kali revisi DIPA dan POK yang bertujuan untuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Selain itu, revisi ini juga dapat meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas ini. Berdasarkan revisi DIPA terbaru sesuai dengan surat pengajuan Inspektur Jenderal Nomor 272/IJ-IND/IX/2020 tanggal 21 September 2020, revisi ini merupakan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap dan/atau ralat karena kesalahan administrasi dengan pagu tetap yaitu sebesar Rp 30,111,422,000,-.

Berdasarkan revisi tersebut, jumlah anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 738,262,000,- dari semula Rp 564,369,000,-. Kenaikan jumlah anggaran sebesar 30.81% ini digunakan untuk pelaksanaan *rapid test* dan *PCR swab test* dalam rangka mendukung kegiatan audit kinerja dan belanja jasa dalam rangka penyusunan peta risiko satuan kerja. Sampai dengan akhir bulan September 2020 ini, realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 189,361,531,- atau 25.65%.

Revisi ini menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan pada beberapa kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran dan menyebabkan potensi perubahan pada dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan III (Juli-September) yaitu:

#### 1. Kegiatan Pengawasan

##### a. Inspektorat I:

###### a.1. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli yaitu:

- Sampling audit Kinerja dan pengelolaan BMN pada SMTI Bandar Lampung;
- Reviu LK/BMN pada Unit BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Kegiatan pendampingan penyempurnaan Renstra 2020-2024 pada 6 (enam) satuan kerja, yaitu: STTT Bandung, SMAK Bogor, AKA Bogor, STMI Jakarta, APP Jakarta dan BDI Jakarta.

**a.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus yaitu:**

- Audit Kinerja dan pengelolaan BMN pada SMK-SMTI Yogyakarta; Audit kinerja dan pengelolaan anggaran pada BDI Yogyakarta;
- Reviu LK/BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan BPSDMI semester I Tahun Anggaran (TA) 2020;
- Pendampingan Implementasi Manajemen Resiko di AKA Bogor, STTT Bandung, SMAK Bogor, APP Jakarta, STMI Jakarta, BDI Jakarta dan BPSDMI; serta
- Reviu revisi realokasi anggaran pada BPSDMI TA 2020.

**a.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan September yaitu:**

- Pemantauan Sarana dan Prasarana di Politeknik AKA Bogor, STTT Bandung dan SMAK Bogor pada tanggal 17 – 18 September 2020;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan BMN di APP Jakarta dan STMI Jakarta pada tanggal 21 September – 2 Oktober.
- Audit Pelaksanaan Anggaran Diklat 3 in 1 di Pusdiklat, BPSDMI pada tanggal 21 September – 2 Oktober;
- Monitoring Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perindustrian Tahun 2020 pada tanggal 1 – 11 September 2020;
- Reviu Usulan Revisi DIPA BPSDMI pada tanggal 25 - 28 September 2020; dan
- Reviu usulan Revisi DIPA Sekretariat Jenderal pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020.

**b. Inspektorat II:**

**b.1. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli yaitu:**

- Reviu revisi anggaran TA 2020 pada Direktorat Industri Elektronika dan Telematika;
- Verifikasi penyelesaian hibah BMN Ditjen IKMA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes.

**b.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus yaitu:**

- Reviu LK/BMN Semester I TA 2020 pada Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan BPIPI;
- Pengawasan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE;

- *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Baru pada unit Dekonsentrasi Bengkulu dan Jambi.

**b.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan September yaitu:**

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Wirausaha Baru (WUB) pada 6 unit Dekonsentrasi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**c. Inspektorat III:**

**c.1. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli yaitu:**

- Kegiatan pengawalan realisasi capaian kinerja dan kegiatan beresiko pada B4T, BBLM, BBT, BBK, BBPK Bandung;
- Reviu LK/BMN pada unit BPPI dan Inspektorat Jenderal.

**c.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus yaitu:**

- Reviu LK-BMN Semester I TA 2020 yang dilakukan di kantor: BBIHP Makassar, BDI Banda Aceh, BDI Medan, BDI Padang, BDI Palembang, BDI Bandar Lampung, BDI Surabaya, BDI Pontianak, BDI Banjarbaru, BDI Samarinda, BDI Manado, BDI Ambon, dan BPPSI Pekanbaru;
- Reviu LK-BMN Semester I TA 2020 yang dilakukan di Satker: BBIA Bogor, B4T Bandung, BBLM Bandung, BBK Bandung, BSI Jakarta, BBKK Jakarta.

**c.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan September yaitu:**

- Audit internal pada 6 (enam) unit, yaitu Baristand Lampung, B4T Bandung, BBT Bandung, BBTPPI Semarang, BBIA Bogor dan BBPK Bandung;
- Reviu Re-Evaluasi BMN pada 5 (lima) Baristand Aceh, Baristand Palembang, Baristand Banjarbaru, Baristand Ambon, Baristand Surabaya; dan
- Reviu revisi anggaran pada satuan kerja di lingkungan BPPI.

**d. Inspektorat IV:**

**d.1 Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli yaitu:**

- Audit pada Ditjen KPPII telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni-3 Juli dan saat ini dalam tahap klarifikasi;
- Audit pada Ditjen Industri Agro telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari-27 Maret dan saat ini dalam tahap klarifikasi;
- Audit pada Ditjen IKFT telah dilaksanakan sejak awal bulan Juli dan direncanakan

selesai pada Agustus 2020. Kegiatan audit pada satker tersebut sempat dihentikan sementara karena auditor melakukan kegiatan rewiu LK/BMN. Proses audit akan dilanjutkan di minggu kedua agustus untuk pengujian substansi;

- Rewiu LK/BMN pada Ditjen Industri Agro, Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, dan Pusat P3DN;
- Koordinasi penyelesaian hibah BMN pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, Ditjen Industri Agro.

**d.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus yaitu:**

- Audit kinerja pada unit Ditjen IKFT;
- Rewiu revisi anggaran pada unit pusat P3DN;
- Rewiu LK-BMN Semester I TA 2020 pada unit Ditjen KPAIL, Agro, IKFT & KPAIL;
- Persiapan penyelesaian BMN Ditjen Industri Agro, IKFT & KPAIL
- Kegiatan pengawalan: survei lapangan ke calon penerima bantuan pemerintah/ Ditjen IKFT untuk industri pembuatan obat tradisional dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo.

**d.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan September yaitu:**

- Audit kinerja pada pusat P3DN TA 2019;
- Rewiu persiapan Partisipasi Indonesia sebagai *Official Partner Country* Hannover Messe 2021;
- Penyelesaian Hibah BMN yang dikuasai pihak lain pada Ditjen IKFT, Ditjen IA dan KPAIL (Padang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jombang, Surabaya, Malang, Kab. Pacitan, Kabupaten Sragen, Sampang);
- Pendampingan survei lapangan Fasilitasi Sertifikasi TKDN dalam *e-katalog*;
- Rewiu belanja subsidi BMDTP COVID TA 2020 pada Ditjen IKFT dan Ditjen IA;
- Audit internal BMN pada Ditjen IA terkait peralatan Bioethanol 500 liter di Kabupaten Puncak Jaya;
- Pendampingan pelaksanaan webinar Direktorat IUI;
- Konsultasi pendampingan lainnya terhadap satker cakupan tugas Inspektorat IV serta penyelesaian administrasi internal.

## **2. Perencanaan Anggaran dan *Refocussing* Anggaran**

### **a. Anggaran Tahun 2020**



Hingga bulan September 2020 ini telah dilakukan revisi dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Jenderal dan revisi dokumen DIPA masing-masing sebanyak 3 kali. Tujuan dilakukannya revisi ini adalah untuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal, antisipasi terhadap perubahan kondisi, mempercepat pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal serta meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas ini.

Berdasarkan revisi tersebut, jumlah anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 738,262,000,- dari semula Rp 564,369,000,- (bertambah sebesar 30.81%). Kenaikan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan rapid test dan PCR/SWAB *test* bagi pegawai Inspektorat Jenderal dalam rangka kegiatan audit kinerja dan belanja jasa untuk penyusunan peta risiko satuan kerja. Sampai dengan akhir September 2020 ini, realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 189,361,531,- atau sebesar 25.65%.

Permasalahan yang dihadapi pada akhir triwulan III ini adalah terbitnya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam SE tersebut diatur bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah terlanjur dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun COVID-19. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi anggaran dalam rangka ralat akun.

#### **b. Anggaran Tahun 2021**

Dokumen RKA-K/L Inspektorat Jenderal Tahun 2021 saat ini telah diinput pada Aplikasi SAKTI dan saat ini sedang dalam penelaahan oleh Tim DJA. RKA-K/L ini masih menggunakan Pagu Indikatif sebesar Rp 40.643.630.000. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Inspektorat Jenderal Tahun 2021 masih perlu dilakukan koordinasi dengan DJA pada tahap pagu alokasi.

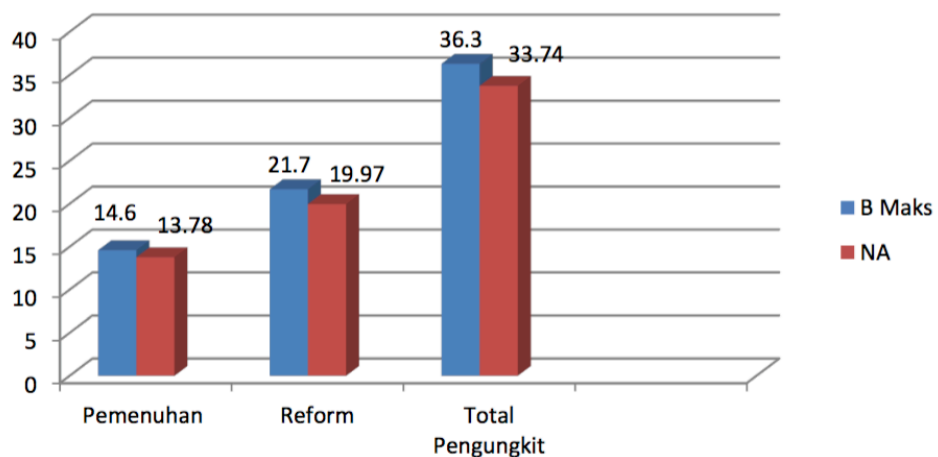
### **3. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

Sesuai hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian), Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,74 dari 36,30 (92,96%),
- 2) Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 77,56 dari 100,00 (77,56%),
- 3) Nilai Index PMPRB Kementerian Perindustrian sebesar 79,17 dari 100,00 (79,17%).

*Data penilaian secara rinci terlampir.*

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit kerja eselon I Kementerian Perindustrian tahun 2020



**Keterangan :**

**B Maks** : Bobot Maksimal  
**NA** : Nilai Akhir

**4. Implementasi Zona Integritas dan Penerapan WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian**

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Zona Integritas (ZI) serta penerapan WBK/WBBM yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2020, serta berdasarkan diskusi dengan KEMENPAN dan RB, berikut beberapa catatan hasil

evaluasi dijumpai pada satker di lingkungan Kementerian Perindustrian:

- a) Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 (enam) area perubahan;
- b) Belum terlihat terjadinya pola pikir dan budaya kerja. Dalam hal ini satker hanya fokus mengejar nilai/penghargaan;
- c) Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah;
- d) Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;
- e) Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar *public campaign* dan belum pada pembangunan secara sistemik;
- f) Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut Kertas Kerja Evaluasi (KKE) internal dengan kondisi nyata di lapangan;
- g) Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektif;
- h) Inovasi pelayanan belum sepenuhnya bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan *stakeholder*;
- i) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

## 5. Pengisian SIHARKA

Pengisian SIHARKA (Aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan ASN yang dikeluarkan oleh Menpan RB) telah selesai diisi oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal sampai tanggal 28 Juli 2020. Aplikasi ini bertujuan mempermudah proses audit penghasilan ASN. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) non auditor dan

pejabat eselon I dan II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menyampaikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi SIHARKA.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor R/1251/SJ-IND.2/KP/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui aplikasi SIHARKA dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam hal Inspektorat bertindak selaku verifikator. Masing-masing Inspektorat telah membentuk tim verifikator sebagai berikut:

No	Inspektorat	Unit	Auditor yang ditugaskan
1	Inspektorat I	BPSDMI	1. Jelita Berliana 2. Arantxa Tiar
2	Inspektorat II	Ditjen IKMA dan BPIPI	Pengendali Mutu: Edy Waspan Pengendali Teknis: Razali C. Ketua Tim: Rizki Aviandri Anggota: 1. Giry Rachman 2. Agung Tri Utomo 3. Galih Tri Purnomo 4. Dinavita Rizkyanti
		Ditjen ILMATE	Pengendali Mutu: Edy Waspan Pengendali Teknis: Abdul Hamid Ketua Tim: Dwi Harjanto Anggota: 1. Hariadi Amri 2. Alexander H Nainggolan 3. Armanita Kusumaningrum 4. Azka Rianto TN
3	Inspektorat III	-	
4	Inspektorat IV	Ditjen KPAIL	1. Ciendy Martha Gayatri 2. Zuan Andri Wijayanto
		Ditjen IKFT	1. Tjahyono 2. Tiurma Julian Pardede

No	Inspektorat	Unit	Auditor yang ditugaskan
		Ditjen Agro	1. Dyan Garneta 2. Abu Naim Toyib

## 6. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data terkait penyelesaian temuan hasil pengawasan internal adalah sebagai berikut:

### Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan III Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Jumlah Temuan	Nilai	Jumlah TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	SR	BSR
1	Pusat	136	Rp10.374.970	6	130	192	14	3
2	Balai Besar	0	-	0	0	0	0	0
3	Baristand	0	-	0	0	0	0	0
4	Balai Diklat	7	-	4	3	7	4	3
5	Sekolah	61	-	21	40	94	37	12
6	Dekonsentrasi	0	-	0	0	0	0	0
Total		204	Rp10.374.970	31	173	293	55	18

Metode penghitungan dari indikator ini adalah membandingkan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) dan Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai rencana aksi yang dibuat oleh satker dengan jumlah total rekomendasi.

Dari data tersebut terlihat bahwa posisi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 24,91% dari target yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 91%.

Kemudian, pada triwulan III ini telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan penyelesaian saldo temuan hasil pengawasan eksternal melalui *video conference*. Menindaklanjuti rapat tersebut, saat ini sedang dilakukan pembuatan surat penyelesaian tindak lanjut berdasarkan hasil rapat dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Satker yang memiliki temuan.

Berdasarkan LHP BPK nomor 11b/LHP/XV/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan nomor 11c/LHP/XV/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, terdapat sebanyak 14 (empat belas) temuan dan 28 (dua puluh delapan) rekomendasi pada Laporan Keuangan TA 2019. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berjumlah 4 (empat) temuan dengan rekomendasi berjumlah 6 (enam) rekomendasi. Temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berjumlah 10 (sepuluh) dengan rekomendasi berjumlah 22 (dua puluh dua) rekomendasi. Total temuan yang harus disetor ke kas Negara Rp4.967.582.710,63 dengan target penyelesaian Desember 2020. Nilai yang sudah disetor sampai dengan 25 Agustus 2020 sebesar Rp1.011.346.557,-.

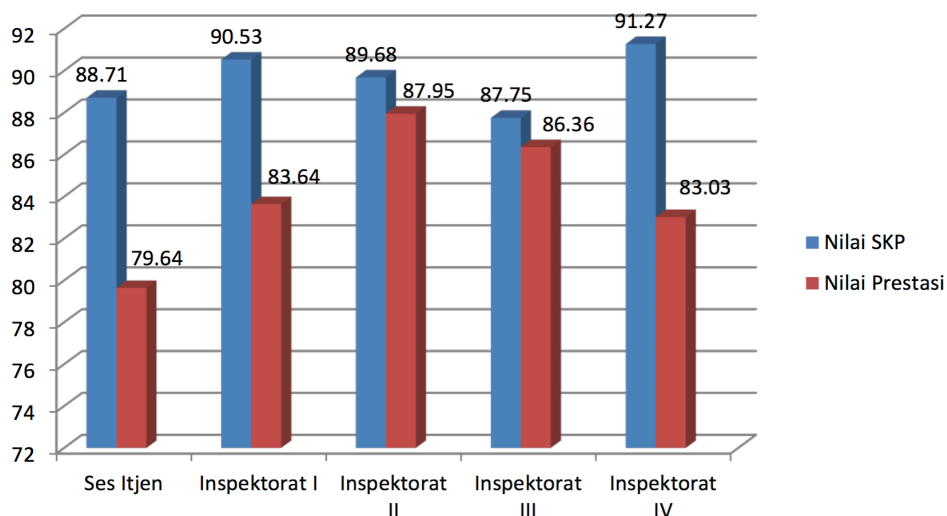
#### **7. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)**

Dalam rangka penataan tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 dan pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap SOP AP yang harus diisi oleh para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian sebagai penanggung jawab kegiatan. Sampai dengan laporan disusun, hasil monev belum dapat dilaporkan.

#### **8. Monitoring penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal**

Dalam rangka meningkatkan kinerja PNS dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

telah dilakukan monitoring penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai SKP dan Nilai Prestasi pegawai tidak dapat diperbandingkan, karena melihat data diatas, nilai SKP tinggi tidak mencerminkan nilai prestasi juga tinggi, ini merupakan bukti bahwa penilaian pegawai Inspektorat Jenderal masih bersifat subjektif. Seharusnya nilai SKP dan nilai Prestasi bisa berbanding lurus. Dari grafik diatas juga dapat dilihat, nilai SKP tertinggi pada tahun 2019 yaitu Inspektorat IV, sedangkan nilai prestasi tertinggi pada tahun 2019 lalu terlihat pada Inspektorat II.

## 9. Pengelolaan Kepegawaian

Sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan SDM, telah dilakukan *Fit and Proper Test* kenaikan jenjang 5 (orang) auditor pada tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Suwarta, Abu Naim Toyib, Tiorma Juliani Pardede, Zita Tessa Rahayani dan Rayersaad Saesar. Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan Hasil Seleksi kepada Inspektur Jenderal sesuai dengan nota dinas nomor 606/IJ-IND.1/KP/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

Selain itu dalam rangka pengelolaan kepegawaian, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Telah diikutsertakan 3 (tiga) orang pegawai pada diklat penjenjangan calon auditor, dimana *e-learning* telah dilaksanakan pada tanggal 10-22 Juli 2020 dan pembelajaran tatap muka jarak jauh dilaksanakan tanggal 29 Juli – 18 Agustus

2020. Peserta yang mengikuti diklat ini adalah Gun Gun Gumilar Nurul Zatinika, Elizabeth Frycillya Aritonang, dan Noer Dwi Rizkia Putri.

- ✓ Penyampaian Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan 2 ke BPSDMI atas nama Farha Maulidia dan Fernando Noverian
- ✓ Penyampaian Akun Operator Satker untuk *inpassing* Jabatan Fungsional Perbendaharaan ke KPPN VII
- ✓ Penyampaian undangan seleksi calon Auditor Muda atas nama M. Adhi Rachmaidi.
- ✓ Koordinasi Revisi Formasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan
- ✓ Koordinasi peserta *inpassing* Jabatan Fungsional Perbendaharaan atas nama Munawir, Rosiana Taruni, Ira Sukmayanti, dan Sutarno.
- ✓ Penyampaian calon peserta Diklat Infografis angkatan 2 ke Pusdiklat BPSDMI atas nama Desmy Fitra.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan menyamakan persepsi antar auditor dalam melaksanakan tugas, telah dilaksanakan juga kegiatan **Pelatihan Di Kantor Sendiri**, antara lain:

- 1) "Implementasi SPIP dan Manajemen Resiko" (penyelenggara: Inspektorat I);
- 2) "Revaluasi BMN" (penyelenggara: Inspektorat I);
- 3) "Teknis Pemeriksaan Perjalanan Dinas Luar Negeri" (penyelenggara: Inspektorat IV);
- 4) "Teknis Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa (perencanaan dan pelaksanaan)" (penyelenggara: Inspektorat IV);
- 5) "Teknis Pemeriksaan Paket Meeting Dan Honorarium" (penyelenggara: Inspektorat IV);
- 6) "Teknis Pemeriksaan Barang Persediaan dan Pemeliharaan" (penyelenggara: Inspektorat IV);
- 7) "Teknis Pemeriksaan SPIP/Manajemen Risiko" (penyelenggara: Inspektorat IV);
- 8) "Redesain Sistem Penganggaran" (13 Juli 2020) dengan narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- 9) "Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021" (13 Juli 2020), dengan narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- 10) "Bagan Akun Standar" (15 Juli 2020);



- 11) “Persamaan Persepsi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015” (17 Juli 2020) dengan narasumber dari Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II;
- 12) “Pengawasan dan Tindak Lanjut Solusi Kontrak di Masa Pandemi” (30 Agustus 2020) dengan narasumber Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, LKPP;
- 13) “Penyusunan RSNI di Lingkungan Kemenperin” (1 September 2020) dengan narasumber Kabid Perumusan dan Penguatan Standarisasi Industri, BPPI;
- 14) “Penerbitan dan Pengawasan SNI” (1 September 2020) dengan narasumber Kasubdit Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN;
- 15) “Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan” (September 2020) dengan narasumber dari Biro Keuangan
- 16) “Data Analitik Dalam Audit” (11 September 2020) dengan narasumber IT Audit Head, Audit Data Science Head, Audit Data Engineer Head (CIMB)
  
- 17) “Penyusunan RSNI di Lingkungan Kementerian Perindustrian” (1 September 2020) dengan narasumber dari Pusat Standarisasi Industri, BPPI.

## **10. Penyusunan Peraturan**

Terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan hingga bulan September 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan data Ditjen IKMA pada tahap finalisasi dengan target penyelesaian sampai akhir tahun 2020.
- b. Pembahasan Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 5 Agustus 2020
- c. Telah disusun beberapa konsep Peraturan, yaitu Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kendali Mutu Pengawasan, dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal.
- d. Evaluasi peraturan yang menghasilkan output berupa penyusunan SK tim yang telah selesai dan sudah ditandatangani.

- e. Konsep peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal telah disusun dan diserahkan kepada Inspektur Jenderal.

Hingga bulan September 2020, masih dilakukan pembahasan peraturan-peraturan tersebut dengan para *stakeholders* dan belum terdapat peraturan yang resmi dikeluarkan.

## **11. Laporan APIP Semester I Tahun 2020**

Laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semester I Tahun 2020 telah disampaikan ke KeMENPAN & RB pada tanggal 1 September. Namun demikian, sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020, Inspektorat Jenderal belum dapat menyusun Laporan Hasil Pengawasan Internal yang harus disampaikan kepada Menteri Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Permenperin No 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian Pasal 39.

## **12. Evaluasi SAKIP Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian**

Evaluasi atas implementasi SAKIP unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dimulai dengan pendaftaran admin unit eselon I pada aplikasi SAKIP Kementerian Perindustrian, pengunggahan dokumen akuntabilitas ke aplikasi SAKIP online serta penilaian SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 20-28 Juli 2020. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan konfirmasi pada tanggal 29 Juli 2020 dan rapat pleno antar tim penilai serta penandatanganan Berita Acara pada tanggal 30 Juli 2020.




Berikut ini adalah perbandingan hasil penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2019 dan 2020.





### Nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian


No	Eselon I	Nilai 2020	Nilai 2019
1	Ditjen Industri Agro	86,51 (A)	84,77 (A)
2	BPPI	83,80 (A)	87,18 (A)
3	Ditjen IKMA	82,16 (A)	81,42 (A)
4	Sekretariat Jenderal	81,69 (A)	83,24 (A)
5	Ditjen ILMATE	81,27 (A)	78,44 (BB)
6	Ditjen IKFT	80,54 (A)	75,49 (A)
7	Inspektorat Jenderal	75,41 (BB)	81,96 (A)
8	Ditjen KPAll	73,44 (BB)	85,29 (A)
9	BPSDMI	72,34 (BB)	-

Adapun progres capaian dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Triwulan III diinformasikan pada tabel berikut :

**Tabel 11. Progres Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal TW III**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.5%	Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2019: Rp 3,368,036,653,338 Temuan BPK: Rp 4,967,582,710.63 Maka, $\frac{\text{Temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Kemenperin}} = 0.15 \%$	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan III, karena jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti akan dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun, Rapat pleno akan dilakukan pada Triwulan IV	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	Telah dilaksanakan pelayanan ini pada klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal TW III, namun pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti belum dapat dilaporkan	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91%	Hingga bulan September 2020, ✓ Temuan seluruh satker berjumlah 183 temuan. ✓ Total Rekomendasi untuk seluruh satker: 267, capaian hingga TW III ini baru 19%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Berdasarkan data terlampir, <u>Jumlah Indeks RB</u> Jumlah nilai max dalam penilaian RB  = $(5.16/6.25)*100\%=82.56\%$ dibulatkan menjadi 83%	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Saat ini sedang dalam proses pembuatan kuesioner, dan kegiatan ini akan diadakan secara online.	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Kegiatan ini akan tetap dilaksanakan dengan pengisian kuesioner secara <i>online</i> melalui masing-masing kepala satuan kerja	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Saat ini dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan level IACM Itjen. Pada TW IV ini akan direncanakan <i>self-assessment</i> menggunakan aplikasi dari BPKP untuk penilaian Level 3 IACM.	

**Keterangan :**



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

### III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan III Tahun 2020, terdapat beberapa *output* (keluaran) Inspektorat Jenderal yang masih dilaksanakan agar sesuai dengan target yang ditentukan. Agar kegiatan berjalan lancar, perlu evaluasi yang harus dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala yang teridentifikasi hingga Triwulan III, antara lain:

1. Terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan Aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.
2. Terdapat lima (5) SPTJB yang belum diinput dalam sistem aplikasi keuangan sehingga mempengaruhi data yang diperoleh pada system Laporan PP 39 berbeda dengan data yang sebenarnya. Adapun SPTJB yang dimaksud adalah nomor 50, 51, 52, 53, dan 54 di Bulan September 2020.
3. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada Triwulan III tahun 2020 mengalami kendala yang cukup berarti dimana adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penghematan anggaran sehingga banyak kegiatan monitoring dan pengawasan yang ditiadakan. Selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari *work from office* (WFO) ke *work from home* (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu penjadwalan ulang, serta realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota, sehingga seluruh kegiatan pengawasan di satker yang ada di luar kota tertunda dan mengalami pergeseran jadwal atau bahkan hanya dilakukan pengawasan secara online.
4. Adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) dimana kegiatan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak terdapat realisasi keuangan, sehingga realisasi keuangan Inspektorat IV masih sedikit walaupun realisasi fisiknya tinggi
5. Adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah terlanjur dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun COVID-19;
6. Koordinasi melalui media online memerlukan kecepatan sarana prasarana dan kualitas SDM yang handal sehingga peningkatan kompetensi pegawai sangat

diperlukan.

7. Realisasi fisik dan ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan terjadi karena belum adanya pengendalian yang memadai dari penanggungjawab kegiatan dan lemahnya pengendalian internal.
8. Kurangnya tenaga administrasi di Inspektorat IV sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat diajukan pertanggungjawaban keuangannya. Hal ini menyebabkan realisasi Inspektorat IV rendah walaupun berbagai kegiatan telah dilaksanakan.

#### **III.4. Langkah Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mereviu kembali penyelenggaraan seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal utamanya kegiatan pengawasan agar dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian (penyusunan KKA, penerbitan LHA/SPM dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Internal kepada Menteri Perindustrian Semester I);
2. Agar meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal agar kinerja pengawasan dan dukungannya berjalan dengan baik; Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada Tahun Anggaran 2020.
3. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur ulang perencanaan kegiatan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal pada triwulan IV tahun 2020 sehingga target kinerja dapat tercapai.
4. Berkoordinasi dengan bagian Keuangan, Program, dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal guna mempercepat proses pencairan keuangan dan mengalokasikan SDM untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Terkait Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ)



Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan adalah dengan merevisi anggaran dalam rangka ralat akun;

6. Bekerja sama dengan Pusdatin atau pihak ketiga untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja cakupan tugas agar Inspektorat Jenderal dapat tetap melaksanakan seluruh kegiatannya secara efektif dan efisien melalui sistem teknologi informasi yang memuat *big data* dari seluruh satuan kerja cakupan tugas. Pandemi virus Covid-19 merupakan titik balik yang membuktikan bahwa telah tiba saatnya Inspektorat Jenderal memiliki sistem informasi yang komprehensif dan terintegrasi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hal ini juga sebagai bentuk peran dan dukungan Inspektorat Jenderal dalam memajukan pelaksanaan *Making Indonesia/Industry 4.0*.
7. Agar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas pencapaian kinerja secara rutin dan segera menyusun mekanisme pemberian *reward and punishment* berdasarkan hasil monev tersebut;
8. Mengoptimalkan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal sebagai unit layanan Inspektorat Jenderal kepada *stakeholder*;
9. Mengoptimalkan *website* Inspektorat Jenderal dan majalah “SOLUSI” sebagai media informasi dan sarana komunikasi pengawasan dan sebagai sarana peningkatan kompetensi untuk para auditor;
10. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal masih jauh dibawah target tahunan, untuk itu masing-masing Inspektorat agar berkoordinasi dengan satker cakupan tugas masing-masing dan mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
11. Isian data pada aplikasi SMART DJA akan digunakan juga oleh Bagian Keuangan dan Umum sebagai dasar rekonsiliasi keuangan secara rutin setiap bulan, untuk itu Kasubag Program dan Tata Usaha masing-masing Inspektorat agar secara rutin memutakhirkan data Realisasi Volume Keluaran dan Indikator Keluaran Kegiatan;
12. Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.

## SBAB IV PENUTUP

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (Januari-September) mencapai Rp 18,952,134,389,- atau 62.94 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 30,111,422,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian realisasi fisik dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal.

Terkait dengan merebaknya pandemi COVID-19, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target. Selain itu perlu diadakannya redesain sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2020 oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No. S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran menjadi lebih efisien dengan menggunakan metode *Zero Based Budgeting* serta meningkatkan keselerasan rumusan Program dan Kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Informasi capaian kinerja Triwulan III ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pemantauan dan evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan, agar target kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

# LAMPIRAN

Lampiran : Nilai PMPRB Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian

**NILAI PMPRB UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020**

No	UNIT ESELON I	PEMENUHAN			REFORM			TOTAL PENGUNGKIT		
		B Maks	NA	PN	B Maks	NA	PN	B Maks	NA	PN
1.	Sekretariat Jenderal	14,60	13,82	94,66%	21,70	18,30	84,33%	36,30	32,13	88,51%
2.	Inspektorat Jenderal	14,60	13,51	92,53%	21,70	19,49	89,82%	36,30	33,00	90,91%
3.	Ditjen Industri Agro	14,60	13,82	94,66%	21,70	20,74	95,58%	36,30	34,55	95,18%
4.	Ditjen ILMATE	14,60	13,51	92,53%	21,70	20,87	96,17%	36,30	34,37	94,68%
5.	Ditjen IKMA	14,60	13,76	94,25%	21,70	20,73	95,53%	36,30	34,49	95,01%
6.	Ditjen IKFT	14,60	14,12	96,71%	21,70	20,33	93,67%	36,30	34,45	94,90%
7.	Ditjen KPAIL	14,60	13,60	93,15%	21,70	18,85	86,87%	36,30	32,45	89,39%
8.	BPSDMI	14,60	13,91	95,27%	21,70	19,90	91,70%	36,30	33,82	93,17%
9.	BPPI	14,60	13,96	95,62%	21,70	20,50	94,47%	36,30	34,45	94,90%
	<b>Rata-Rata Nilai</b>	<b>14,60</b>	<b>13,78</b>	<b>94,37%</b>	<b>21,70</b>	<b>19,97</b>	<b>92,01%</b>	<b>36,30</b>	<b>33,74</b>	<b>92,96%</b>

**Keterangan :**

**B Maks** : Bobot Maksimal

**NA** : Nilai Akhir

**PN** : Persentase Nilai (%)

**NILAI PMPRB UNIT PUSAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020**

<b>KOMPONEN</b>		<b>BOBOT MAKSIMAL</b>	<b>NILAI AKHIR</b>	<b>PERSEN NILAI (%)</b>
<b>A. PENGUNGKIT</b>				
	I. Pemenuhan	20,00	18,44	92,20
	II. Hasil Antara	10,00	5,62	56,20
	III. Reform	30,00	21,24	70,80
	<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>45,30</b>	<b>75,50</b>
<b>B. HASIL</b>				
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,46	84,60
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,50	75,00
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	10,00	9,10	91,00
	4. Kinerja Organisasi	10,00	7,20	72,00
	<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>32,26</b>	<b>80,65</b>
	<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>100,00</b>	<b>77,56</b>	<b>77,56</b>